



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

**RENCANA
KERJA
TAHUN
2024**

(RENJA)
SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA



KATA PENGANTAR

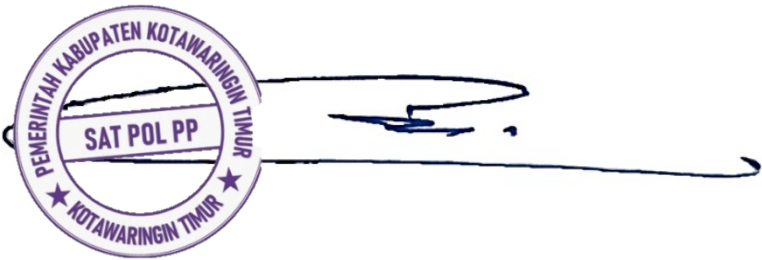
Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga buku Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 ini dapat terselesaikan. Rencana Kerja (Renja) tahun 2024 disusun sesuai dengan klasifikasi, kodefikasi, nomenklatur serta program dan kegiatan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019.

Rencana Kerja (Renja) ini disusun sebagai penjabaran lebih jauh dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kotawaringin Timur khususnya Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2024, sekaligus mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran melalui pelaksanaan berbagai program dan kegiatan tahun 2024 sebagai upaya pemecahan berbagai masalah dengan meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik yang berkualitas, efektif, efisien dan berkesinambungan.

Akhir kata semoga Rencana Kerja Perangkat Daerah ini dapat dijadikan pedoman sebagai bahan masukan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2024 yang akan datang serta dapat meningkatkan akuntabilitas publik melalui pencapaian Visi dan Misi. Masukan dan saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan dari semua pihak untuk kesempurnaan agar penyelenggaraan program dan kegiatan Satpol PP Kab. Kotim menjadi lebih baik di masa yang akan datang.

Sampit, 26 Juli 2023

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**



**Drs. MUHAMMAD FUAD SIDIQ, M.M
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19640927 198510 1 001**

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Penyusunan.....	5
 BAB II HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN	 7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Satuan Polisi Pamong Praja.....	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja	22
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	24
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	25
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	32
 BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	 33
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	33
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	34
3.3 Program dan kegiatan	35
 BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	 49
 BAB V PENUTUP	 50

DAFTAR TABEL

	Halaman
2.1 Realisasi Belanja Langsung Tahun 2022	8
TC-29 Tabel TC-29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Kab. Kotim	14
TC-30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur	23
TC-31 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur	26
Rumusan Rencana Program dan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026 Kab. Kotim	39

BAB I

PENDAHULUAN

Tujuan nasional Negara Republik Indonesia yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 adalah ***“Melindungi segenap bangsa indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia”***. Untuk merealisasikannya diperlukan perencanaan yang terstruktur dan terukur dalam batas waktu tertentu, seperti melalui pendekatan RPJP, RPJM, Renstra SOPD, RKPD dan Renja SOPD, dengan demikian Renja SOPD merupakan salah satu landasan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun program dan kegiatan pembangunan tahunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SOPD yang selanjutnya menjadi acuan SOPD dalam melaksanakan dan merealisasikan program dan kegiatan pembangunan tersebut.

1.1 Latar Belakang

Perencanaan adalah langkah awal dalam menjalankan suatu organisasi, dimana perencanaan berfungsi membantu para pengambil kebijakan dalam menetapkan tujuan yang ingin dicapai terutama untuk menyusun strategi dalam rangka mencapai tujuan tersebut. Perencanaan dilakukan sebagai cara untuk mengantisipasi dan merekam perubahan, sebagai cara untuk mengarahkan pelaksanaan kegiatan, meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan terutama untuk memperkecil pemborosan dan meminimalisir tumpang tindih pelaksanaan kegiatan. Perencanaan juga dilakukan dalam rangka menetapkan standar yang akan dipakai untuk mempermudah pengawasan.

Dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap SOPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SOPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SOPD dan mengacu kepada RKPD yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. RKPD dijadikan dasar penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana kerja Perangkat Daerah juga memuat Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan bersifat indikatif. Keterkaitan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Kotim harus mendukung dalam mewujudkan visi, misi dan program Kepala Daerah Terpilih yang tertuang dalam RPJMD yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program perangkat daerah, lintas perangkat daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Dari keterkaitan perencanaan di atas, dapat disimpulkan bahwa Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Organisasi Perangkat Daerah (RKA-SOPD) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024. Sedangkan Rencana Kerja Anggaran Satuan Organisasi Perangkat Daerah (RKA-SOPD) akan menjadi acuan dalam menentukan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), dan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SOPD.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024 adalah :

- 1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Propinsi Kalimantan Tengah dan Pengubahan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 (Lembaran Negara Nomor 65 Tahun 1956);
- 2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4288);
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 4) Undang-Undang Nomor : 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 5) Undang-Undang Nomor : 24 Tahun 2005 Tentang Standart Akuntansi Pemerintah;
- 6) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

- 7) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- 9) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6042);
- 12) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
- 13) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
- 14) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
- 15) Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
- 16) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

- 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
- 19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;
- 20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja;
- 21) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- 22) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 518);
- 23) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan rencana Pembangunan jangka menengah Daerah, serta tata cara perubahan Pembangunan jangka menengah daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 24) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- 25) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 26) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
- 27) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 28) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2006 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 Nomor 16);
- 29) Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2008 Nomor 2);
- 30) Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2015 Nomor 5);

- 31) Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 8);
- 32) Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Susunan dan Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Susunan dan Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2018 Nomor 10);
- 33) Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2021;
- 34) Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Dan Rincian Tugas Pokok, Fungsi Serta Uraian Tugas Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur;

1.3 Maksud Dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 adalah sebagai pedoman, gambaran dan arah pembangunan dalam jangka pendek (satu tahun) yaitu tahun 2024 yang berisi program dan kegiatan yang dilaksanakan langsung oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Kotim dengan dukungan pembiayaan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur. Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024 adalah :

1. Terwujudnya penjabaran Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024;
2. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi hasil pembangunan;
3. Memberikan informasi yang komprehensif tentang rencana program dan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan Satpol PP Kab. Kotim Tahun Anggaran 2024;
4. Menyediakan dokumen acuan yang pasti bagi pelaksanaan program dan kegiatan yang menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Satpol PP Kab. Kotim;
5. Menjadi landasan bagi penyusunan Rencana Kerja Anggaran SOPD (RKA-SOPD) Tahun Anggaran 2024

1.4 Sistematika Penyusunan

Penulisan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2024 ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah. Hasil perumusan rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur disajikan dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan Terhadap Kajian Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V : PENUTUP

BAB II	HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN LALU
---------------	---

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SOPD Tahun Lalu (2022) Dan Capaian Renstra Satuan Polisi Pamong Praja

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun anggaran 2022 dan pencapaian kinerja Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur dilakukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Satpol PP dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Satpol PP serta hambatan dan permasalahan yang di hadapi. Dalam mencapai sasaran-sasaran yang diinginkan, Satpol PP Kab. Kotawaringin Timur telah menyusun Anggaran yang diperlukan sesuai dengan target kinerja yang disepakati bersama. Pada tahun 2022 sebelum P.APBD TA. 2022 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur telah melaksanakan 2 program dengan 8 Kegiatan dan 25 Sub Kegiatan dengan Pagu anggaran sebesar Rp. 12.322.248.550 dengan alokasi dana sebesar Rp. 10.428.388.890,- untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota berupa Kegiatan administrasi Keuangan, Kepegawaian, umum, pemeliharaan dan jasa penunjang perangkat daerah yang terealisasi sebesar Rp. 9.125.163.500,- dan alokasi dana sebesar Rp. 2.827.724.902,- untuk Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum berupa Kegiatan pada bidang-bidang pada Satpol PP yang terealisasi sebesar Rp. 2.616.810.712,- Adapun rincian evaluasi realisasi Program dan Kegiatan Satpol PP Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1

No	Nama	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Belanja Daerah			Rp. 13.256.113.792,-	Rp. 11.741.974.212,-	88,58%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			Rp. 10.428.388.890,-	Rp. 9.125.163.500,-	87,50%
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Rp. 7.219.189.733,-	Rp. 6.237.062.107,-	86,40%
1.	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pegawai yang terpenuhi gaji dan tunjangan	Rp. 7.219.189.733,-	Rp. 6.237.062.107,-	86,40%
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Rp. 233.099.000,-	Rp. 230.688.990,-	98,97%
2.	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atributnya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atributnya pada Satpol PP	Rp.162.875.000,-	Rp.161.265.000,-	99,01%
3.	Sub Kegiatan Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis	Rp. 70.224.000,-	Rp. 69.423.990,-	98,86%
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			Rp. 928.792.000,-	Rp. 803.867.586,-	86,55%
4.	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah pengadaan komponen listrik	Rp. 16.492.800,-	Rp. 16.492.800,-	100%
5.	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	Rp. 329.671.600,-	Rp. 261.461.000,-	79,31%
6.	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah pengadaan peralatan rumah tangga	Rp. 64.031.700,-	Rp. 63.902.700,-	99,80%
7.	Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah pengadaan barang cetakan dan penggandaan	Rp. 41.440.000,-	Rp. 31.634.500,-	76,34%
8.	Sub Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah pengadaan bahan bacaan	Rp. 12.960.000,-	Rp. 6.480.000,-	50%
9.	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Material	Jumlah pengadaan bahan/material	Rp. 59.905.900,-	Rp. 53.904.900,-	89,98%
10.	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu yang di fasilitasi	Rp. 29.400.000,-	Rp. 26.150.000,-	88,95%
11.	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Rp. 374.890.000,-	Rp. 343.841.686,-	91,72%
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Rp. 201.605.600,-	Rp. 200.876.400,-	99,64%
12.	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Rp. 140.000.000,-	Rp. 139.947.400,-	99,96%
13.	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan mebel	Rp. 61.605.600,-	Rp. 60.929.000,-	98,90%
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Rp. 867.600.653,-	Rp. 802.947.237,-	92,55%
14.	Sub Kegiatan Penyediaan jasa Surat menyurat	Jumlah surat yang dipenuhi	Rp. 3.600.000,-	Rp. 3.600.000,-	100%
15.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang dibayar	Rp. 92.991.375,-	Rp. 79.299.891,-	85,28%
16.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang di pelihara	Rp. 23.150.000,-	Rp. 18.353.000,-	79,28%
17.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 747.859.278,-	Rp. 701.694.346,-	93,83%
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Rp. 978.101.904,-	Rp. 849.721.180,-	86,87%
18.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Ops lapangan	Jumlah kendaraan yang dipelihara	Rp. 387.064.404,-	Rp. 282.283.690,-	72,93%

RENCANA KERJA TAHUN 2024

19.	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Rp. 591.037.500,-	Rp. 567.437.490,-	96,01%
-----	---	--	-------------------	-------------------	--------

No	Nama	Indikator Kinerja	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum			Rp. 2.827.724.902,-	Rp. 2.616.810.712,-	92,54%
Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota			Rp. 2.745.124.902,-	Rp. 2.537.430.712,-	92,43%
20.	Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli dan Pengawasan.	Jumlah aparaturnya yang melaksanakan pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum pada saat patroli, piket, pengamanan dan pengawasan lapangan	Rp. 2.662.927.402,-	Rp. 2.478.260.712,-	93,07%
21.	Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kantrantibum serta perlinmas tingkat Kab/Kota	Jumlah kegiatan pengamanan, penertiban, pendataan dan pelaporan terkait penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, satlinmas, daerah rawan bencana, pos jaga dan lokasi rencana penampungan bencana serta pelaksanaan apel siaga satlinmas dalam rangka Gelar Pasukan Pengamanan Pilkada/Pileg/Pilpres bersama Polri	Rp. 9.927.500,-	Rp. 8.280.000,-	83,40%
22.	Sub Kegiatan Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan Kantrantibum	Jumlah kegiatan bagi Aparat Satpol PP dan Satlinmas untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi dalam melaksanakan tugas yang bermuansa HAM	Rp. 50.520.000,-	Rp. 29.140.000,-	57,68%
23.	Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum yang berkualitas	Rp. 21.750.000,-	Rp. 21.750.000,-	100%
Kegiatan Penegakan Perda Kabupaten / Kota dan Peraturan Bupati/Walikota			Rp. 82.600.000,-	Rp. 79.380.000,-	96,10%
24.	Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Perda dan Perbup/Walikota	Jumlah kegiatan penyuluhan dan sosialisasi peraturan daerah dan peraturan bupati/walikota bagi masyarakat dan lingkungan pendidikan	Rp. 61.300.000,-	Rp. 61.160.000,-	99,77%
25.	Sub Kegiatan Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah pengawasan, pendataan dan pelaporan terhadap perda dan perbup yang dilaksanakan	Rp. 21.300.000,-	Rp. 18.220.000,-	85,54%

A. Realisasi program/ kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang di rencanakan.

Berdasarkan pada tabel 2.1 diatas, capaian realisasi keuangan pada 2 program dan 8 kegiatan dan 25 sub kegiatan selama tahun 2022 terdapat 5 (lima) kegiatan yang capaian realisasi keuangan di bawah 90% yaitu :

1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan capaian realisasi keuangan 86,40%, dikarenakan Pembayaran Tunjangan Penghasilan Pegawai periode ub. September sampai dengan Desember tahun 2022 belum dibayarkan dan akan dibebankan pembayarannya pada Anggaran tahun 2023 dan dicatat sebagai utang beban dalam Laporan Keuangan Tahun 2022

2. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan capaian realisasi keuangan sebesar 79,31% disebabkan karena ada belanja modal komputer yang tidak dapat dibayarkan oleh daerah dan dicatat sebagai utang beban dalam Laporan Keuangan Tahun 2023.
- Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan capaian realisasi keuangan sebesar 76,34%. Hal ini dikarenakan sesuai dengan realisasi pembayaran secara *ad cost*.
- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan dengan capaian realisasi keuangan sebesar 50% disebabkan karena jumlah eksemplar koran yang dibayarkan kurang dari jumlah eksemplar koran yang dianggarkan selama 1 (satu) tahun.
- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Material dengan capaian realisasi keuangan sebesar 89,98%. Hal ini disebabkan karena adanya belanja yang tidak dapat direalisasikan yaitu belanja pembuatan kartu identitas anggota Satpol PP dikarenakan terbatasnya waktu pembuatan dan anggaran dana yang diberikan oleh daerah kepada SOPD.
- Sub Kegiatan Fasilitas Tamu dengan capaian realisasi keuangan sebesar 88,95%. Hal ini dikarenakan sesuai dengan realisasi pembayaran secara *ad cost*. Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

-
- 3. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik berupa tagihan internet, listrik dan air dengan capaian realisasi keuangan sebesar 85,28%. Hal ini dikarenakan sesuai dengan realisasi pembayaran secara *ad cost*.
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor berupa tagihan internet, listrik dan air dengan capaian realisasi keuangan sebesar 79,28%. Hal ini dikarenakan sesuai dengan realisasi pembayaran secara *ad cost*.
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Operasional Lapangan berupa belanja pemeliharaan kendaraan dinas operasional, belanja BBM dan oli serta belanja honorarium tenaga kontrak dengan capaian realisasi keuangan sebesar 72,93%. Hal ini dikarenakan anggaran yang tersedia pada sub kegiatan tersebut lebih besar dari jumlah realisasi yang dibayarkan.
- 4. Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota
 - Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kantrantibum Serta Pelindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota dengan capaian realisasi keuangan sebesar 83,40%. Hal ini dikarenakan keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan pada bidang terkait.
 - Sub Kegiatan Kerjasama Antar Lembaga Dan Kemitraan Dalam Teknik Pencegahan Dan Penanganan Gangguan Kantrantibum dengan capaian realisasi keuangan sebesar 57,68%. Secara fisik sub kegiatan tersebut telah terlaksana 100% namun secara realisasi keuangan tidak dapat tercapai. Hal ini dikarenakan terbatasnya dana yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk mengakomodir semua pembayaran kegiatan yang ada pada SOPD sehingga pembayaran untuk sub kegiatan Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan Dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Kantrantibum tidak semua dapat dibayarkan.
- 5. Kegiatan Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota
 - Sub Kegiatan Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan Peraturan Bupati/Walikota dengan capaian

realisasi keuangan sebesar 85,54%. Hal ini dikarenakan keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan pada bidang terkait.

B. Kegiatan yang telah memenuhi target

Adapun realisasi program/ kegiatan yang telah memenuhi target kinerja dengan capaian lebih dari 90% sebanyak 11 (sebelas) sub kegiatan diantaranya;

- 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya dengan capaian 99,01%
- 2) Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan dengan capaian 98,86%
- 3) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan bangunan Kantor dengan capaian 100%
- 4) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan capaian 99,80%
- 5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan capaian 91,72%
- 6) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Daerah dengan capaian 99,96%
- 7) Pengadaan Mebel dengan capaian 98,90%
- 8) Penyediaan jasa Surat menyurat dengan capaian 100%
- 9) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan capaian 93,83%
- 10) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan capaian 96,01%
- 11) Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli dan Pengawasan dengan capaian 93,07%
- 12) Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan capaian 100%
- 13) Sosialisasi Penegakan Perda dan Perbup/Walikota dengan capaian 99,77%

C. Kegiatan yang melebihi target

Kegiatan yang melebihi target kinerja TA 2022, sebagaimana di tetapkan dalam Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satpol PP Kab. Kotawaringin Timur tahun 2022 tidak ada.

D. Faktor –faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan

Pencapaian target untuk Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur pada tahun 2022

sudah baik dengan capaian realisasi keuangan sebesar 88,58% meskipun terdapat beberapa program dan kegiatan yang tidak mencapai lebih dari 90%. Hambatan dan kendala program serta kegiatan sehingga tidak dapat terlaksana dan tidak mencapai lebih dari 90% adalah :

1. Terbatasnya kas daerah yang menyebabkan beberapa kegiatan tidak dapat dibayarkan dan dilaksanakan;
2. Kurangnya koordinasi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dalam melaksanakan kegiatan yang ada pada anggaran;
3. Jangka waktu disahkannya DPA perubahan dengan pelaksanaan kegiatan hingga akhir tahun sangat singkat;
4. Adanya utang beban pada sub kegiatan yang tidak dapat dibayarkan yaitu pada Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dan Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

E. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah

Dari program yang sudah dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur terdapat implikasi yang timbul dari pelaksanaan program dan kegiatan terhadap target capaian Renstra yaitu adanya beberapa kegiatan yang tidak terlaksana secara maksimal akibat terbatasnya kas daerah. Selain itu kurangnya koordinasi pejabat pada perencanaan terkait standart biaya juga patut di pertimbangkan kembali agar tidak timbul masalah-masalah dalam merencanakan program dan kegiatan yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur.

F. Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut

Langkah- langkah kebijakan yang sebaiknya di ambil dalam rangka mengatasi faktor- faktor hambatan yang menyebabkan tidak berjalannya kegiatan secara maksimal adalah mengevaluasi kembali kegiatan yang sudah di programkan serta meninjau kembali pada kesinkronan data perencanaan mengenai standart biaya di lapangan. Menekankan kembali kepada anggota, bahwa Satpol PP merupakan OPD yang dapat membantu mengoptimalkan pajak daerah dengan bekerja bersama dinas terkait.

Secara rinci dapat dilihat pada Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2022 disajikan dalam tabel TC-29:

Tabel T-C 29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
Kabupaten Kotawaringin Timur

Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Kotim

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
										Target Renja Perangkat daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/4
1	05	01				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Tingkat pemenuhan komponen penunjang perangkat daerah yang sesuai ketentuan perundang-undangan								
1	05	01	2	02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase kewajiban administrasi keuangan yang terlaksana								
1	05	01	2	02	01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pegawai yang terpenuhi gaji dan tunjangannya	60 Orang	0	75 Orang	74 Orang	100 %	60 Orang	135	2,25
1	05	01	2	05		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang terpenuhi								
1	05	01	2	05	02	Sub Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas pada Satpol PP	150 Buah	0	0 Stel	150 Stel	100 %	112 Stell	262 stell	1,74
1	05	01	2	05	09	Sub Kegiatan Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	2 orang	0	0 Orang	0 Orang	0	2 org	2 Orang	1
1	05	01	2	05	11	Sub Kegiatan Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis	4 Orang	0	3 Orang	2 Orang	98,86 %	4 Orang	6 Orang	1,5

1	19	02	03			Program Peningkatan Disiplin Aparatur										
1	19	02	03	02		Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu (Satpol PP)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	05	02	05			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur										
1	05	02	05	02		Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terwujudnya SDM yang memahami peraturan perundang-undangan	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	05	01	2	06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi									
1	05	01	2	06	01	Sub Kegiatan Penyediaan komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah pengadaan komponen listrik	35 Buah	0	7 Buah	1 tahun	100 %	35 Buah	35 buah	1	
1	05	01	2	06	02	Sub Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	6 Unit	0	2 Unit	2 Unit	100 %	9 Unit	11 Unit	1,8	
1	05	01	2	06	05	Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah pengadaan barang cetakan dan penggandaan	40.000 Lembar/50 Buku	0	34.480 Lembar/30 Buku	34.480 lembar	100 %	40.000 Lembar/ 50 buku	74.480 lembar	1,8	
1	05	01	2	06	06	Sub Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah pengadaan bahan bacaan	1800 Eksemplar	0	1.080 Eksemplar	1.080 Eksemplar	100%	2.160 Eksemplar	3.240 ekslemplar	1.8	
1	05	01	2	06	07	Sub Kegiatan Penyediaan bahan/material	Jumlah pengadaan bahan/material	1 Paket	0	1 Paket	1 Paket	100 %	1 Paket	2 Paket	2	
1	05	01	2	06	08	Sub Kegiatan Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah kunjungan tamu yang di fasilitasi	10 Kali	0	6 kali	6 kali	100 %	10 Kali	16 kali	1.6	
1	05	01	2	06	09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	40 Kali	0	75 kali	75 kali	100%	40 Kali	115 kali	2.8	
1	05	02	02			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur										
1	05	02	02	09		Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Meningkatnya penyediaan peralatan gedung kantor	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	05	02	02	22		Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	0	0	0	0	0	3 Gedung	3 Gedung	0	

1	05	02	01			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran										
1	05	02	01	17		Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman yang memadai	0	0	0 Orang	0	0	0 Orang	0	0	
1	05	02	01			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran										
1	05	02	01	18		Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi dan Pengamanan Ke Luar Daerah	Tersedianya anggaran untuk kegiatan rapat koordinasi, konsultasi dan pengamanan di luar daerah	0	0	0 kali	0	0	0 Kali	0	0	
1	05	02	01	19		Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi dan Pengamanan Ke Dalam Daerah	Tersedianya anggaran untuk kegiatan rapat koordinasi, konsultasi dan pengamanan di dalam daerah	0	0	0 kali	0	0	0	0	0	
1	05	01	2	07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kebutuhan pengadaan barang penunjang yang terpenuhi									
1	05	01	2	07	02	Sub Kegiatan Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah pengadaan kendaraan dinas	0 Unit	0	0 Unit	4 Unit	100 %	0 Unit	4 Unit	4	
1	05	01	2	07	05	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan mebel	10 Unit	0	0 Unit	55 Unit	100 %	12 Unit	67 unit	6.7	
1	05	01	2	08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi									
1	05	01	2	08	01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang dipenuhi	200 Surat	0	360 Surat	360 Surat	100 %	200 Surat	560 Surat	2.8	
1	05	01	2	08	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang dibayar	3 Rekening	0	3 Rekening	3 Rekening	100 %	3 Rekening	6 Rekening	2	
1	05	01	2	08	03	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	0 Unit	0 Unit	10 Unit	0 Unit	0	0 Unit	10 unit	100	
1	05	01	2	08	04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa pelayanan umum kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor	29 Orang	0 Unit	29 orang	0 Unit	0	29 Orang	58 Orang	2	
1	05	02	01			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran										
1	05	02	01	07		Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Aparatur Pol PP yang melaksanakan kegiatan administrasi keuangan	0	0	Orang	15 Orang	100 %	0 Orang	15 Orang	100	

1	05	02	01	08		Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya peralatan dan bahan pembersih serta insentif bagi petugas kebersihan	0	0	0 Gedung	15 unit	100 %	0	15 Unit	100
1	05	01	2	09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang terpenuhi								
1	05	01	2	09	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan yang dipelihara	15 Unit	0	15 Unit	12 Unit	100 %	15 Unit	30 Unit	2
1	05	01	2	09	11	Sub Kegiatan Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana-prasarana pendukung gedung/bangunan yang dipelihara/direhabilitasi	15 Unit	0	0 Unit	3buah	100 %	10 Unit	13 Unit	0,8
1	05	02				Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang terselesaikan								
1	05	02	2	01		Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota yang terlaksana								
1	05	02	2	01	02	Sub Kegiatan Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah kegiatan pelaksanaan penindakan eksekusi, penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada	1 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1
1	05	02	2	01	03	Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pengamanan, penertiban, pendataan dan pelaporan terkait penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, satlinmas, daerah rawan bencana, pos jaga dan lokasi rencana penampungan bencana serta pelaksanaan apel siaga satlinmas dalam rangka Gelar Pasukan Pengamanan Pilkada/Pileg/Pilpres bersama Polri	5 Kali	0 Kali	5 Kali	5 kegiatan	100 %	5 Kali	10 Kegiatan	2

1	05	02	2	01	06	Sub Kegiatan Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan dengan berkerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam melaksanakan pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	2 Kegiatan	0 Kegiatan	4 Kegiatan	1 Kegiatan	100 %	4 Kegiatan	5 Kegiatan	2,5
1	05	02	2	01	07	Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum Yang Berkualitas	0 Paket	0 Paket	0 Paket	0 Paket	0	0 Paket	0	0
1	05	02	2	01	09	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Dalam Rangka Dampak Penegakkan Perda dan Perkada	Jumlah layanan yang tersedia sebagai dampak atas penegakkan Perda dan Perkada	0 Tahun	0 Tahun	0 Tahun	0 Tahun	0	0 Tahun	0	0
1	05	02	2	02		Kegiatan Penegakkan Perda Kabupaten /Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Persentase pelaksanaan penegakkan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota								
1	05	02	2	02	01	Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah kegiatan penyuluhan dan sosialisasi peraturan daerah dan peraturan bupati/walikota bagi masyarakat dan lingkungan pendidikan	2 Kegiatan	0 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100 %	2 Kegiatan	4 Kegiatan	0
1	05	02	2	02	02	Sub Kegiatan Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah pengawasan, pendataan dan pelaporan terhadap perda dan perbup yang dilaksanakan	10 Kali	0 Kegiatan	6 kali	6 Kegiatan	100 %	6 Kali	12 Kali	1,2
1	05	02	2	02	03	Sub Kegiatan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah aparaturnya yang berkerjasama melalui sidang Tipiring dan kegiatan lainnya yang terkait dalam menangani pelanggaran perda dan perbup	17 Orang	0 Orang	0 Orang	55 Orang	100 %	17 orang	72 Orang	4,2
1	05	02				Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang terselesaikan								
1	05	02	2	01		Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota yang terlaksana								

1	05	02	2	01	04	Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Satlinmas yang diberdayakan dalam rangka mewujudkan ketentraman dan ketertiban di lingkungan masyarakat baik berupa penyuluhan, honorarium dan sarana, prasarana dan kelengkapan penunjang	1400 Orang	0 Kegiatan	1 Kegiatan	0 Kegiatan	0	2 kegiatan	2 Kegiatan	2
1	05	02				Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang terselesaikan								
1	05	02	2	01		Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota yang terlaksana								
1	05	02	2	01	01	Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	Jumlah aparat yang melaksanakan pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum pada saat patroli, piket, pengamanan dan pengawasan lapangan	275 Orang	0 Orang	118 Orang	55Orang	100 %	275 Orang	825	3
1	05	02	2	01	05	Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas SDM Satpol PP dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah kegiatan bagi Aparat Satpol PP dan Satlinmas untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi dalam melaksanakan tugas yang bernuansa HAM	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	1 Kegiatan	100 %	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2
1	05	02	2	01	07	Sub Kegiatan Pembinaan Jabatan Fungsional Satpol PP	Jumlah aparat Satpol PP yang menduduki jabatan fungsional	0	0	0	0	0	0 Orang	0	0
1	05	02				Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang terselesaikan								
1	05	02	2	03		Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota yang dibina								
1	05	02	2	03	01	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah PPNS yang mengikuti Sosialisasi,Pendidikan Formal dan Bimtek Teknis	1 Orang	0 Orang	1 Orang	0 Orang	0	2 Orang	2 Orang	2

1	05	02	26			Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Jumlah keamanan dan kenyamanan lingkungan yang meningkat keamanannya								
						Kegiatan penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan		0	0	0 Orang	0	0	0	0	0
						Kegiatan Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan		0	0	0 Kegiatan	0	0	0	0	0
						Kegiatan Pendataan dan pelaporan (Pendataan anggota Satlinmas dalam rangka pembuatan database kabupaten)		0	0	0	0	0	0	0	0
						Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan		0 Orang	0	0 Orang	0 Orang	0	0 Orang	0	0
						Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan		0 Kali	0 Kali	0 Kali	0 Kali	0	0 Kali	0	0
1	05	02	16			Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal									
						Kegiatan Peningkatan Kerjasama dgn Aparat Keamanan & Teknik Pencegahan Kejahatan	Terwujudnya lingkungan masyarakat yang aman, tertib dan terkendali	0	0	0 Kali	0 Kali	0	0	0	0
						Kegiatan Kerjasama Pengembangan Kemampuan aparat Polisi Pamong Praja dengan TNI/Polri dan Kejaksaan	Jumlah aparaturnya yang mengendalikan keamanan dakam rangka pengamanan pemilu/pilkada	0	0	0 Orang	0 Orang	0	0	0	0
						Kegiatan Pengendalian keaman dalam rangka pengamanan pelaksana Pemilu/Pilkada	Jumlah aparaturnya yang mengendalikan keamanan dakam rangka pengamanan pemilu/pilkada	0	0	0	0	0	0	0	0
						Kegiatan Pengamanan kegiatan pejabat pusat/daerah	Jumlah aparaturnya yang melaksanakan pengamanan kegiatan pejabat pusat dan daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
						Kegiatan Peningkatan kerjasama dalam menegakan Perda Tipiring Aparat Satpol-PP dg TNI/POLRI dan Kejaksaan	Terlaksananya Penegakan Perda	0	0	0	0	0	0	0	0
						Kegiatan Peningkatan kerjasama dalam menegakan Perda eksekusi Aparat Satpol-PP dg TNI/POLRI dan Kejaksaan	Terwujudnya lingkungan masyarakat yang aman, tertib dan terkendali	0	0	0 Kali	0 Kali	0	0	0	0
						Kegiatan Peningkatan Operasional dan Pengawasan Lapangan	Terwujudnya Patroli untuk memelihara keamanan dan Ketertiban Umum	0	0	0	0 Orang	0	0	0	0

						Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan		0		0 Kali	0 Kali	0	0	0	0
1	05	02	19			Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan									
						Kegiatan Apel Siaga Satlinmas Dalam Rangka Gelar Pasukan Pengamanan Pileg dan Pilpres Bersama Polri		0	0	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0	0	0	0
1	05	02	21			Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat									
1	05	02	21	02		Kegiatan Penyuluhan Kepada Pelaku Usaha		0	0	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0	0	0	0
						Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba		0	0	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0	0	0	0
						Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan		0	0	0	0	0	0	0	0
1	05	02	21			Program Pendidikan Politik Masyarakat									
						Kegiatan Penyuluhan Kepada Masyarakat		0	0	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0	0	0	0

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur selama melaksanakan Renstra 2016-2021 berusaha melaksanakan semua fungsi yang menjadi tanggung jawab Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur semaksimal mungkin, terutama mengadakan sosialisasi/penyuluhan kepada masyarakat tentang peraturan Daerah/ Peraturan Bupati yang harus di ketahui, di mengerti, dan di laksanakan, supaya pemerintahan daerah berjalan dengan baik dan lancar.

Ketentraman dan ketertiban umum merupakan hal yang dinamis yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan tertib, tentram dan teratur dengan tujuan untuk menunjang pelaksanaan penunjang pembangunan daerah merupakan ketentuan dasar dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Itu sendiri. Dalam meyelenggarakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, harus diikuti dengan menegakkan peraturan Daerah dan peraturan Kepala Daerah. Hal ini sangat penting dilaksanakan mengingat perkembangan penduduk baik dari kuantitas maupun kualitas di Kabupaten Kotawaringin terus berkembang dan meningkat. Untuk mengatur semua ini maka penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah wajib dilaksanakan.

Kabupaten Kotawaringin Timur memiliki luas wilayah 16.496 km² dan berpenduduk kurang lebih sebanyak 428.895 jiwa, yang terdiri dari 17 (tujuh belas) kecamatan, 132 (seratus tiga puluh dua) desa dan 12 (dua belas) kelurahan. Dengan penduduk yang heterogen sangat rawan atas timbulnya gangguan Kamtibmas serta penyebaran penyakit sosial akibat pertumbuhan penduduk dan penduduk pendatang.

Sesuai dengan tugas dan fungsi tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur menetapkan visi ***“Terwujudnya pelayanan penegakan PERDA dan PERKADA, ketertiban umum ketentraman dan perlindungan masyarakat yang professional di Kabupaten Kotawaringin Timur.”***

Pengukuran hasil kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Kotim ditentukan berdasarkan capaian indikator kinerja, sasaran dan program, rumusan penghitungan indikator kinerja kegiatan, target capaian di dalam rencana strategis dan juga capaian kinerjanya sebagaimana dapat dilihat pada tabel T-C 30 di bawah ini.

Tabel T-C 30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Kotawaringin Timur

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Persentase Penegakkan PERDA dan PERKADA			93%	93%	94%	94%	94,08%	0	94%	94%	
3	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat			27	27	27	27	31	0	27	27	
4	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)			94%	95%	96%	96%	94,08%	0	96%	96%	
5	Jumlah PPNS Satpol PP di Kab. Kotim			2 Orang	2 Orang	2 Orang	2 Orang	7 Orang	0	2 Orang	2 Orang	
6	Jumlah warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materiil/pelayanan pengobatan akibat dari penegakkan hukum Perda dan Perkada			5 Orang	5 Orang	5 Orang	5 Orang	-	-	5 Orang	5 Orang	
11	Nilai evaluasi atas implementasi SAKIP Satpol PP			B	B	B	B	B	-	B	B	

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Suasana tentram dan tertib menjadi modal dasar baik dalam menjalankan roda pemerintahan maupun roda perekonomian, roda pemerintahan dan roda perekonomian tidak akan berjalan dengan optimal apabila kondisi ketentraman ketertiban dan perlindungan masyarakat tidak terselenggara dengan baik oleh sebab itu, ketiga aspek pelayanan dasar tersebut menjadi aspek strategis bagi Satuan Polisi Pamong Praja sehingga pemerintah berkewajiban mendukung penguatan kelembagaan dan penganggaran guna menunjang pelaksanaan cipta kondisi tibumtranmas serta perlindungan masyarakat yang kondusif dan berjalan secara optimal.

Pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) maupun Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) tahun menjadi isu strategis bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur karena dikhawatirkan pada pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) maupun Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) tersebut dapat terjadi gangguan ketentraman, ketertiban dan kerawanan gangguan keamanan di beberapa daerah di Kabupaten Kotawaringin Timur yang tingkat kerawannya cukup tinggi, kerawanan tersebut dikhawatirkan sebelum pelaksanaan pemilihan yaitu pada masa kampanye, pada saat pelaksanaan pemungutan suara dan pada saat pengumuman hasil penhitungan suara. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur beserta Satlinmas bertugas untuk melaksanakan pengamanan pada setiap tahapan Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) maupun Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres), dengan senantiasa berkoordinasi dengan instansi terkait itu dilaksanakan guna menciptakan rasa tentram, tertib dan merasa terlindunginya masyarakat dalam beraktifitas.

Pada tabel dibawah ini menerangkan beberapa hambatan-hambatan hingga rekomendasi kebijakan yang akan di ambil oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Kotim demi meningkatnya kinerja di Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Kotawaringin Timur.

No	Permasalahan dan Hambatan Dalam Pelaksanaan Tupoksi SKPD	Dampak Terhadap Pencapaian Visi-Misi Kepala Daerah	Tantangan dan Peluang	Rekomendasi atau Catatan Strategis
1	Masih Minimnya Kendaraan Operasional Untuk pelaksanaan kegiatan lapangan	Belum optimalnya Pemeliharaan dan pengawasan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakkan Perda/Perkada	Pemeliharaan dan pengawasan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakkan Perda/Perkada dapat terlaksana lebih optimal	Pengadaan Kendaraan operasional

RENCANA KERJA TAHUN 2024

2	Minimnya kompetensi SDM yang memiliki keahlian khusus yaitu PPNS dalam upaya penegakkan Perda/Perkada	Belum optimalnya Penanganan penegakkan Perda/Perkada	Peningkatan kompetensi SDM yang memiliki keahlian khusus yaitu PPNS mampu meningkatkan profesionalisme dalam penanganan penegakkan Perda/Perkada	Pelaksanaan Diklat PPNS
3	Sarana dan prasarana kantor yang kurang representatif	Belum optimalnya pelayanan dalam menunjang pelaksanaan kegiatan terkait ketentraman dan ketertiban umum serta penegakkan Perda/Perkada	Peningkatan sarana dan prasarana dapat membuat tugas dan fungsi dalam pelaksanaan kegiatan terkait ketentraman dan ketertiban umum serta penegakkan Perda/Perkada menjadi lebih optimal	Pengadaan sarana dan prasarana kantor
4	Minimnya peran aktif dan kompetensi SDM Satlinmas sebagai bagian Satpol PP dalam menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungan masyarakat	Belum optimalnya kondisi lingkungan masyarakat yang aman terkait adanya gangguan kamtibmas	Meningkatnya kondisi lingkungan masyarakat yang aman dan terkendali	Pelaksanaan penyuluhan dan pelatihan bagi satlinmas serta koordinasi di tingkat kecamatan dan kelurahan terkait peran aktif satlinmas
5	Belum terpenuhinya rasio Polisi PP dengan luas wilayah dan jumlah penduduk	Belum optimalnya Pemeliharaan dan pengawasan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakkan Perda/Perkada	Pemeliharaan dan pengawasan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakkan Perda/Perkada dapat terlaksana lebih optimal	Penambahan jumlah anggota Satpol PP sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada

2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 disusun dengan berpedoman kepada RPJPD dan RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur. Perlu adanya komitmen Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur terkait penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati di Kabupaten Kotawaringin Timur sesuai dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 53 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten Kotawaringin Timur yang tertuang dalam RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur untuk tahun-tahun mendatang.

Berdasarkan kebutuhan pendanaan penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan

Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati di Kabupaten Kotawaringin Timur, Satuan Polisi Pamong Praja membutuhkan personil, sarana prasarana dan anggaran yang memadai untuk membiayai program maupun kegiatan. Selain itu, diperlukan juga peningkatan kapasitas aparatur Satuan Polisi Pamong Praja yang siap siaga dalam pelaksanaan penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati di Kabupaten Kotawaringin Timur melalui pendidikan dan pelatihan baik dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sendiri maupun oleh instansi tingkat Provinsi maupun Pusat.

Adapun perbandingan antara Rancangan Awal RKPD tahun 2024 dengan Hasil analisis kebutuhan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 tertuang pada tabel T-C 31 berikut ini :

Tabel T-C 31
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Kabupaten Kotawaringin Timur

Satuan Polisi Pamong Praja

Kode						Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
						Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	05	01				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Kab. Kotim	Tingkat pemenuhan komponen penunjang perangkat daerah yang sesuai ketentuan perundang-undangan		9.621.250.870	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Kab. Kotim	Tingkat pemenuhan komponen penunjang perangkat daerah yang sesuai ketentuan perundang-undangan		7.662.006.990	
1	05	01	2	02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Kotim	Persentase kewajiban administrasi keuangan yang terlaksana		7.533.401.082	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Kotim	Persentase kewajiban administrasi keuangan yang terlaksana		6.293.827.692	
1	05	01	2	02	01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kotim	Jumlah pegawai yang terpenuhi gaji dan tunjangannya	78 Orang	7.533.401.082	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kotim	Jumlah pegawai yang terpenuhi gaji dan tunjangannya	60 Orang	6.293.827.692	
1	05	01	2	05		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Kotim	Persentase administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang terpenuhi		138.848.000	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Kotim	Persentase administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang terpenuhi		263.544.000	
1	05	01	2	05	02	Sub Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Kab. Kotim	Jumlah pengadaan pakaian dinas pada Satpol PP	0 Buah	0	Sub Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Kab. Kotim	Jumlah pengadaan pakaian dinas pada Satpol PP	140 Stel	196.000.000	
1	05	01	2	05	09	Sub Kegiatan Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Kab. Kotim	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	0 Orang	0	Sub Kegiatan Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Kab. Kotim	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	2 Orang	25.528.000	
1	05	01	2	05	11	Sub Kegiatan Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Kab. Kotim	Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis	4 Orang	138.848.000	Sub Kegiatan Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Kab. Kotim	Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis	4 Orang	42.016.000	
1	05	01	2	06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Kotim	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi		543.176.000	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Kotim	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi		189.421.200	

1	05	01	2	06	01	Sub Kegiatan Penyediaan komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor	Kab. Kotim	Jumlah pengadaan komponen listrik	1 paket	11.350.000	Sub Kegiatan Penyediaan komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor	Kab. Kotim	Jumlah pengadaan komponen listrik	35 Buah	3.000.000	
1	05	01	2	06	02	Sub Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. Kotim	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	0 paket	30.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. Kotim	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	5 Unit	16.264.600	
1	05	01	2	06	05	Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kab. Kotim	Jumlah pengadaan barang cetakan dan penggandaan	30 paket	37.520.000	Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kab. Kotim	Jumlah pengadaan barang cetakan dan penggandaan	40.000 Lembar/50 Eksemplar/	14.500.000	
1	05	01	2	06	06	Sub Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kab. Kotim	Jumlah pengadaan bahan bacaan	1.440 Eksemplar	15.120.000	Sub Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kab. Kotim	Jumlah pengadaan bahan bacaan	1.800 Eksemplar	10.800.000	
1	05	01	2	06	07	Sub Kegiatan Penyediaan bahan/material	Kab. Kotim	Jumlah pengadaan bahan/material	2 paket	39.366.000	Sub Kegiatan Penyediaan bahan/material	Kab. Kotim	Jumlah pengadaan bahan/material	1 Paket	46.820.600	
1	05	01	2	06	08	Sub Kegiatan Fasilitasi kunjungan tamu	Kab. Kotim	Jumlah kunjungan tamu yang di fasilitasi	12 laporan	26.100.000	Sub Kegiatan Fasilitasi kunjungan tamu	Kab. Kotim	Jumlah kunjungan tamu yang di fasilitasi	10 Kali	12.750.000	
1	05	01	2	06	09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kab. Kotim	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	30 Laporan	383.720.000	Sub Kegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kab. Kotim	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	30 Kali	85.286.000	
1	05	01	2	07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Kotim	Persentase kebutuhan pengadaan barang penunjang yang terpenuhi		0	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Kotim	Persentase kebutuhan pengadaan barang penunjang yang terpenuhi		11.623.000	
1	05	01	2	07	02	Sub Kegiatan Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Kab. Kotim	Jumlah pengadaan kendaraan dinas	0 Unit	0	Sub Kegiatan Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Kab. Kotim	Jumlah pengadaan kendaraan dinas	0 Unit	0	
1	05	01	2	07	05	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Kab. Kotim	Jumlah pengadaan mebel	0 Unit	0	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Kab. Kotim	Jumlah pengadaan mebel	10 Unit	11.623.000	
1	05	01	2	08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kotim	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi		975.955.060	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kotim	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi		632.429.774	
1	05	01	2	08	01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kotim	Jumlah surat yang dipenuhi	300 Surat	3.600.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kotim	Jumlah surat yang dipenuhi	360 Surat	3.600.000	
1	05	01	2	08	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kotim	Jumlah rekening yang dibayar	12 Laporan	121.837.780	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kotim	Jumlah rekening yang dibayar	3 Rekening	43.189.260	

1	05	01	2	08	03	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. Kotim	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	0 Unit	-	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. Kotim	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	0 Unit	00	
1	05	01	2	08	04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa pelayanan umum kantor	Kab. Kotim	Jumlah jasa pelayanan umum kantor	24 laporan	850.517.280	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa pelayanan umum kantor	Kab. Kotim	Jumlah jasa pelayanan umum kantor	29 Orang	565.640.514	
1	05	01	2	09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kotim	Persentase kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang terpenuhi		429.870.728	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kotim	Persentase kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang terpenuhi		271.161.324	
1	05	01	2	09	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Kab. Kotim	Jumlah kendaraan yang dipelihara	21 Unit	318.370.728	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Kab. Kotim	Jumlah kendaraan yang dipelihara	15 Unit	240.711.324	
1	05	01	2	09	11	Sub Kegiatan Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Kab. Kotim	Jumlah sarana-prasarana pendukung gedung/bangunan yang dipelihara/direhabilitasi	15 Unit	88.350.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Kab. Kotim	Jumlah sarana-prasarana pendukung gedung/bangunan yang dipelihara/direhabilitasi	15 Unit	30.450.000	
1	05	01	2	09	09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Kab. Kotim	Jumlah gedung/bangunan yang dipelihara/direhabilitasi	3 Unit	23.150.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Kab. Kotim	Jumlah gedung/bangunan yang dipelihara/direhabilitasi	0 Unit	0	
1	05	02				Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban	Kab. Kotim	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang terselesaikan		1.472.135.328	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban	Kab. Kotim	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang terselesaikan		217.223.900	
1	05	02	2	01		Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kotim	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota yang terlaksana		0	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kotim	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota yang terlaksana		120.873.000	
1	05	02	2	01	02	Sub Kegiatan Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Kab. Kotim	Jumlah kegiatan pelaksanaan penindakan eksekusi, penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada	0 Kegiatan	0	Sub Kegiatan Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Kab. Kotim	Jumlah kegiatan pelaksanaan penindakan eksekusi, penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada	1 Kegiatan	19.050.000	

1	05	02	2	01	03	Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Kotim	Jumlah kegiatan pengamanan, penertiban, pendataan dan pelaporan terkait penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, satlinmas, daerah rawan bencana, pos jaga dan lokasi rencana penampungan bencana serta pelaksanaan apel siaga satlinmas dalam rangka Gelar Pasukan Pengamanan Pilkada/Pileg/Pilpres bersama Polri	0 Kali	0	Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Kotim	Jumlah kegiatan pengamanan, penertiban, pendataan dan pelaporan terkait penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, satlinmas, daerah rawan bencana, pos jaga dan lokasi rencana penampungan bencana serta pelaksanaan apel siaga satlinmas dalam rangka Gelar Pasukan Pengamanan Pilkada/Pileg/Pilpres bersama Polri	10 Kali	82.340.000	
1	05	02	2	01	06	Sub Kegiatan Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Kab. Kotim	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan dengan berkerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam melaksanakan pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	0 Kegiatan	0	Sub Kegiatan Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Kab. Kotim	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan dengan berkerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam melaksanakan pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	2 Kegiatan	19.483.900	
1	05	02	2	01	07	Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab. Kotim	Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum Yang Berkualitas	0 Paket	0	Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab. Kotim	Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum Yang Berkualitas	0 Paket	0	
1	05	02	2	01	09	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Dalam Rangka Dampak Penegakkan Perda dan Perkada	Kab. Kotim	Jumlah layanan yang tersedia sebagai dampak atas penegakkan Perda dan Perkada	0 tahun	0	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Dalam Rangka Dampak Penegakkan Perda dan Perkada	Kab. Kotim	Jumlah layanan yang tersedia sebagai dampak atas penegakkan Perda dan Perkada	0 tahun	0	
1	05	02	2	02		Kegiatan Penegakkan Perda Kabupaten /Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Kab. Kotim	Persentase pelaksanaan penegakkan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota		0	Kegiatan Penegakkan Perda Kabupaten /Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Kab. Kotim	Persentase pelaksanaan penegakkan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota		96.350.000	

1	05	02	2	02	01	Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Kab. Kotim	Jumlah kegiatan penyuluhan dan sosialisasi peraturan daerah dan peraturan bupati/walikota bagi masyarakat dan lingkungan pendidikan	0 Kali	0	Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Kab. Kotim	Jumlah kegiatan penyuluhan dan sosialisasi peraturan daerah dan peraturan bupati/walikota bagi masyarakat dan lingkungan pendidikan	2 kegiatan	52.900.000	
1	05	02	2	02	02	Sub Kegiatan Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Kab. Kotim	Jumlah pengawasan, pendataan dan pelaporan terhadap perda dan perbup yang dilaksanakan	0 Kali	0	Sub Kegiatan Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Kab. Kotim	Jumlah pengawasan, pendataan dan pelaporan terhadap perda dan perbup yang dilaksanakan	10 Kali	24.920.000	
1	05	02	2	02	03	Sub Kegiatan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Kab. Kotim	Jumlah aparaturnya yang berkerjasama melalui sidang Tipiring dan kegiatan lainnya yang terkait dalam menangani pelanggaran perda dan perbup	0 Orang	0	Sub Kegiatan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Kab. Kotim	Jumlah aparaturnya yang berkerjasama melalui sidang Tipiring dan kegiatan lainnya yang terkait dalam menangani pelanggaran perda dan perbup	17 Orang	18.530.000	
1	05	02				Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban	Kab. Kotim	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang terselesaikan		0	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban	Kab. Kotim	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang terselesaikan		37.377.900	
1	05	02	2	01		Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kotim	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota yang terlaksana		0	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kotim	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota yang terlaksana		37.377.900	
1	05	02	2	01	04	Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab. Kotim	Jumlah Satlinmas yang diberdayakan dalam rangka mewujudkan ketentraman dan ketertiban di lingkungan masyarakat baik berupa penyuluhan, honorarium dan sarana, prasarana dan kelengkapan penunjang	0 Kegiatan	0	Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab. Kotim	Jumlah Satlinmas yang diberdayakan dalam rangka mewujudkan ketentraman dan ketertiban di lingkungan masyarakat baik berupa penyuluhan, honorarium dan sarana, prasarana dan kelengkapan penunjang	1 Kegiatan	37.377.900	
1	05	02				Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban	Kab. Kotim	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang terselesaikan		1.472.135.328	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban	Kab. Kotim	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang terselesaikan		1.595.015.760	

1	05	02	2	01		Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kotim	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota yang terlaksana		1.472.135.328	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kotim	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota yang terlaksana		1.595.015.760	
1	05	02	2	01	01	Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan	Kab. Kotim	Jumlah aparaturnya yang melaksanakan pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum pada saat patroli, piket, pengamanan dan pengawasan lapangan	250 kasus	1.472.135.328	Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan	Kab. Kotim	Jumlah aparaturnya yang melaksanakan pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum pada saat patroli, piket, pengamanan dan pengawasan lapangan	275 Orang	1.595.015.760	
1	05	02	2	01	05	Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas SDM Satpol PP dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Kab. Kotim	Jumlah kegiatan bagi Aparat Satpol PP dan Satlinmas untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi dalam melaksanakan tugas yang bernuansa HAM	0 Kegiatan	0	Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas SDM Satpol PP dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Kab. Kotim	Jumlah kegiatan bagi Aparat Satpol PP dan Satlinmas untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi dalam melaksanakan tugas yang bernuansa HAM	0 Kegiatan	0	
1	05	02				Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban	Kab. Kotim	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang terselesaikan		0	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban	Kab. Kotim	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang terselesaikan		50.624.000	
1	05	02	2	03		Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Kab. Kotim	Persentase Pemenuhan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota yang dibina		0	Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Kab. Kotim	Persentase Pemenuhan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota yang dibina		50.624.000	
1	05	02	2	03	01	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Kab. Kotim	Jumlah PPNS yang mengikuti Sosialisasi,Pendidikan Formal dan Bimtek Teknis	0 Orang	0	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Kab. Kotim	Jumlah PPNS yang mengikuti Sosialisasi,Pendidikan Formal dan Bimtek Teknis	2 Orang	50.624.000	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Secara komprehensif, Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Kotim bertugas dan berperan dalam menegakkan Perda, Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta melakukan pembinaan di bidang perlindungan masyarakat sehingga secara detail usulan program dan kegiatan yang disampaikan oleh masyarakat melalui musrenbang mengarah pada upaya peningkatan keamanan, ketertiban, ketentraman dan perlindungan masyarakat. Dalam musrenbang Kab. Kotim untuk tahun 2024, Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Kotim tidak ada usulan program dan kegiatan dari masyarakat.

BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
----------------	--

3.1. Telahaan terhadap Kebijakan Nasional

Dalam upaya menangani dan mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum, pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur membentuk Satuan Polisi Pamong Praja melalui **Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2016** tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2016 no. 09, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur no. 235) yang kemudian diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2016 tentang susunan Organisasi Dan Rincian Tugas Pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan Tugas pembantuan yang di berikan Kabupaten di bidang penegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Kedudukan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur merupakan unsur penunjang pemerintah Daerah yang di pimpin oleh Kepala Satuan dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Tujuan dari Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Kotim adalah Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan keamanan ketertiban. Tujuan ini diturunkan dalam sasaran operasional sebagai berikut :

- a. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan terpeliharanya ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- b. Perumusan kebijakan bidang kentrentaman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat pada sub urusan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai lingkup tugasnya;
- c. Pelaksanaan kebijakan bidang Kententraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat pada sub urusan Satuan Polisi Praja sesuai lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan bidang Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat pada sub urusan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai lingkup;
- e. Pelaksanaan administrasi kedinasan sesuai dengan lingkup tugasnya .

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Dalam upaya mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur merumuskan tujuan dan sasaran dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis penjabaran dari misi Bupati yaitu **Misi 2 : mewujudkan Sumberdaya manusia yang berkualitas, Berdaya Saing, Beriman dan Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan misi 4 : mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, Bersih dan Berwibawa (*Good Governance*)** yang ingin di capai atau di hasilkan dalam periode waktu tertentu. Untuk mewujudkan misi tersebut maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur menetapkan tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum di lingkungan Masyarakat.
2. Meningkatnya kualitas Kinerja Birokrasi.

Dalam rangka untuk menindaklanjuti Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur perlu ditentukan Sasaran yang akan dicapai agar lebih terukur. Penetapan Sasaran ini di perlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan rencana kinerja dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi setiap tahun untuk kurun waktu selama lima tahun kedepan. Adapun sasaran dan indikator sasaran yang di tetapkan yaitu;

1. Meningkatnya jumlah masyarakat/ badan hukum yang patuh terhadap peraturan daerah dan peraturan Kepala Daerah.
 - ❖ Persentase penegakkan PERDA dan PERKADA
2. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan.
 - ❖ Cakupan petugas perlindungan masyarakat (LINMAS)
3. Meningkatnya lingkungan masyarakat yang aman dan tertib
 - ❖ Tingkat Penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)
4. Meningkatnya SDM yang berkualitas dan berkompeten dalam penanganan pelanggaran Perda dan Perkada
 - ❖ Jumlah PPNS Satpol PP di Kab.Kotawaringin Timur
5. Meningkatnya Kapasitas akuntabilitas birokrasi
 - ❖ Nilai Evaluasi atas Implementasi SAKIP Satpol PP

3.3. Program dan Kegiatan

A. Faktor-Faktor Pertimbangan Rumusan Program Dan Kegiatan

Apabila dikaitkan dengan pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Kotawaringin Timur, pada dasarnya kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur adalah sebagai OPD yang memiliki fungsi

dalam penyelenggaraan penegakan Peraturan Perundang – undangan daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Timur. Rumusan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur yang di rencanakan pada tahun 2024 didasarkan pada pertimbangan dari berbagai faktor-faktor, diantaranya tugas pokok dan fungsi, tujuan, dan sasaran dari isu-isu strategis serta gambaran pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur. Adapun Kegiatan yang dilakukan oleh Satpol PP Kab. Kotawaringin Timur tahun 2024 yaitu :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota

- a) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.
- c) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - Sub Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - Sub Kegiatan Penyediaan bahan/material
 - Sub Kegiatan Fasilitasi kunjungan tamu
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
- d) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa pelayanan umum kantor
- e) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan

- Sub Kegiatan Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya.
- Sub Kegiatan Pemeliharaan /rehabilitasi gedung kantor atau bangunan lainnya.

2) Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban

- a) Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan

B. Rekapitulasi Program dan Kegiatan pada Renja Tahun 2024 Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur telah menetapkan 2 (dua) program yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program – program tersebut di atas, dijabarkan dalam beberapa kegiatan dan sub kegiatan. Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur pada tahun anggaran 2024 berjumlah 2 (dua) Program 6 (Enam) kegiatan dan 16 (Enam Belas) Sub Kegiatan yang menurut sifat penyebarannya sesuai dengan fokus pelaksanaan kegiatan.

Untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tujuan dan fokus penyebarannya, maka anggaran yang dibutuhkan Satuan Polisi Pamong Kabupaten Kotawaringin Timur sebesar **Rp. Rp11.093.386.198 (sebelas miliar Sembilan puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh enam ribu seratus Sembilan puluh delapan rupiah).**

C. Rumusan Program dan Kegiatan sesuai dengan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang disusun oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2024 sudah sesuai dengan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2024.

D. Rencana Program dan Kegiatan

Rencana pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang disertai dengan uraian indikator output kegiatan, pagu anggaran, lokasi, yang akan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2024 dijelaskan pada Tabel T-C.33

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 Dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kabupaten Kotawaringin Timur

SKPD: SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. KOTIM

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1						Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar								
1	05					Bidang Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat				11.093.386.198				13.215.900.856
1	05	01				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				9.621.250.870				6.293.827.692
1	05	01	2	02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100%	7.533.401.082			90%	6.293.827.692
1	05	01	2	02	01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				7.533.401.082	APBD Kab. Kotim			4.561.192.592
1	05	01	2	02	03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD				0				
1	05	01	2	02	05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0				
1	05	01	2	02	07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD				0				

RENCANA KERJA TAHUN 2024

1	05	01	2	05		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			100%	138.848.000			90%	663.948.000
1	05	01	2	05	02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Keluaran : Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang di sediakan bagi aparatur Hasil : Terwujudnya aparatur yang berkompeten dan disiplin	Kab. Kotim		0	APBD Kab. Kotim			336.000.000
	05	01	2	05	09	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Keluaran : Jumlah aparatur yang mendapatkan diklat formal Hasil : Terwujudnya aparatur yang berkualitas dan berkompeten	sesuai undangan/Nota dinas/Telaahan staf		0	APBD Kab. Kotim			165.932.000
1	05	01	2	05	11	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Keluaran : Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek implementasi peraturan PerUUan Hasil : Terwujudnya aparatur yang berkompeten dan paham terhadap peraturan PerUUan	sesuai undangan/Nota dinas/Telaahan staf		138.848.000	APBD Kab. Kotim			162.016.000
1	05	01	2	06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			100%	543.176.000			90%	719.710.200
1	05	01	2	06	01	Sub Kegiatan Peyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Keluaran : Jumlah komponen listrik yang disediakan Hasil : Tersedianya komponen listrik/penerangan kantor	Kab. Kotim		11.350.000	APBD Kab. Kotim			3.000.000
1	05	01	2	06	05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Keluaran : Jumlah barang cetak dan penggandaan Hasil : Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	Kab. Kotim		37.520.000	APBD Kab. Kotim			14.500.000
1	05	01	2	06	06	Sub Kegiatan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Keluaran : Jumlah bahan bacaan dan peraturan perUUan yang disediakan Hasil : Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perUUan	Kab. Kotim		15.120.000	APBD Kab. Kotim			32.400.000

RENCANA KERJA TAHUN 2024

1	05	01	2	06	07	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Keluaran : Jumlah bidang yang dilayani kebutuhan atk pertahun Hasil : Terpenuhinya kebutuhan atk disetiap bidang/sekretariat	Kab. Kotim		39.366.000	APBD Kab. Kotim			46.820.600
1	05	01	2	06	08	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Keluaran : Jumlah makanan dan minuman yang tersedia untuk fasilitas kunjungan tamu Hasil : Tersedianya makanan dan minuman dalam kegiatan kunjungan tamu	Kab. Kotim		26.100.000	APBD Kab. Kotim			37.575.000
1	05	01	2	06	09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Keluaran : Jumlah rapat koordinasi, konsultasi dan Pengamanan yang dihadiri terhadap jumlah undangan/nota dinas/telaahan staf pertahun Hasil : Terlaksananya koordinasi, konsultasi dan pengamanan luar dan dalam daerah	sesuai undangan/Nota dinas/Telaahan staf		383.720.000	APBD Kab. Kotim			489.050.000
1	05	01	2	06	02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Keluaran : Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang berkualitas dan tepat guna Hasil : Terwujudnya sarana dan prasarana perlengkapan dan peralatan kantor yang memadai	Kab. Kotim		30.000.000	APBD Kab. Kotim			96.364.600
1	05	01	2	08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100%	975.955.060			90%	1.458.969.440
1	05	01	2	08	01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Keluaran : Jumlah surat/dokumen yang dilayani pertahun Hasil : Terlaksananya kegiatan surat menyurat/dokumen dikantor dengan lancar	Kab. Kotim		3.600.000	APBD Kab. Kotim			3.600.000

RENCANA KERJA TAHUN 2024

1	05	01	2	08	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Keluaran : Jumlah tagihan yang terbayar pertahun Hasil : Terlaksananya kegiatan bidang/sekretariat dikantor dengan lancar	Kab. Kotim		121.837.780	APBD Kab. Kotim			210.276.000
1	05	01	2	08	04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Keluaran : Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia Hasil : Terlaksananya kegiatan jasa pelayanan umum kantor dengan lancar	Kab. Kotim		850.517.280	APBD Kab. Kotim			1.245.093.440
1	05	01	2	09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			80%	429.870.728			90%	305.154.764
1	05	01	2	09	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Operasional atau Lapangan	Keluaran : Jumlah kendaraan dinas / operasional yang dipelihara Hasil : terpeliharanya kendaraaaan dinas/operasional secara rutin/ berkala	Kab. Kotim		318.370.728	APBD Kab. Kotim			262.504.764
1	05	01	2	09	11	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Keluaran : Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara Hasil : Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor secara rutin/berkala	Kab. Kotim		88.350.000	APBD Kab. Kotim			42.650.000
						Sub kegiatan pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor atau bangunan lainnya	Keluaran: jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Kab.kotim		23.150.000	APBD Kab. kotim			30.450.000
1	05	01	2	07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				0			90%	974.767.600
1	05	01	2	07	02	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Keluaran : Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang tersedia Hasil : Optimalnya pelaksanaan kegiatan penunjang tupoksi SOPD	Kab. Kotim		0	APBD Kab. Kotim			974.767.600

RENCANA KERJA TAHUN 2024

1	05	01	2	07	05	Sub Kegiatan Pengadaan Meubel	Keluaran : Jumlah Meubel yang tersedia Hasil : Terwujudnya pelayanan SOPD yang optimal	sesuai undangan/Nota dinas/Telaahan staf		0	APBD Kab. Kotim			11.623.000
1	05	02				Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban			100%	1.472.135.328			90%	2.799.523.160
1	05	02	2	01		Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				1.472.135.328				2.495.587.160
1	05	02	2	01	01	Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan	Keluaran : Jumlah aparaturnya yang melaksanakan pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum pada saat patroli, piket dan pengawasan lapangan serta honorarium tenaga kontrak (Tekon) Hasil : Terlaksananya kegiatan pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum baik berupa pembayaran honorarium (patroli dan piket) operasional dan pengawasan lapangan, honorarium tenaga kontrak (Tekon) dan lainnya yang terkait	Kab. Kotim		1.472.135.328	APBD Kab. Kotim			2.194.335.360
1	05	02	2	01	02	Sub Kegiatan Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Keluaran : Jumlah kegiatan pelaksanaan penindakan eksekusi atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada Hasil : Terwujudnya kegiatan Penindakan Eksekusi oleh aparat Pol.PP dengan TNI/POLRI dan kejaksaan dalam menegakan Perda dan Perkada	Kab. Kotim		0	APBD Kab. Kotim			19.050.000

RENCANA KERJA TAHUN 2024

1	05	02	2	01	03	Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Keluaran : Jumlah kegiatan pengamanan, penertiban, pendataan dan pelaporan terkait penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, satlinmas, daerah rawan bencana, pos jaga dan lokasi rencana penampungan bencana serta pelaksanaan apel siaga satlinmas dalam rangka Gelar Pasukan Pengamanan Pilkada/Pileg/Pilpres bersama Polri Hasil : Persentase kegiatan pengamanan, penertiban, pendataan dan pelaporan terkait penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, pendataan dan pelaporan terkait satlinmas, daerah rawan bencana, pos jaga dan lokasi rencana penampungan bencana yang terpenuhi serta terwujudnya kegiatan apel siaga satlinmas dalam rangka Gelar Pasukan Pengamanan Pilkada/Pileg/Pilpres bersama Polri	Kab. Kotim		0	APBD Kab. Kotim			175.940.000
1	05	02	2	01	04	Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Keluaran : Jumlah Satlinmas yang diberdayakan dalam rangka mewujudkan ketentraman dan ketertiban di lingkungan masyarakat baik berupa penyuluhan, honorarium dan sarana, prasarana dan kelengkapan penunjang Hasil : Terwujudnya Satlinmas yang berkompeten dalam mengendalikan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Kab. Kotim		0	APBD Kab. Kotim			37.377.900

RENCANA KERJA TAHUN 2024

1	05	02	2	01	05	Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas SDM Satpol PP dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Keluaran : Jumlah kegiatan bagi Aparat Satpol PP dan Satlinmas untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi dalam melaksanakan tugas yang bernuansa HAM Hasil : Terwujudnya Aparat Satpol PP dan Satlinmas yang memiliki kapasitas dan kompetensi dalam melaksanakan tugas yang bernuansa HAM	Kab. Kotim		0	APBD Kab. Kotim			49.400.000
						Sub Kegiatan Pembinaan Jabatan Fungsional Satuan Polisi Pamong Praja	Keluaran : Jumlah Aparat Satpol PP yang menduduki jabatan Fungsional Hasil : Terwujudnya Aparat Satpol PP berkompeten dalam tugas dan fungsinya	Kab. Kotim		0	APBD Kab. Kotim			0
1	05	02	2	01	07	Sub Kegiatan Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Keluaran : Jumlah kegiatan yang dilaksanakan dengan berkerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam melaksanakan pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum Hasil : Terwujudnya kondisi yang aman, tentram dan tertib	Kab. Kotim		0	APBD Kab. Kotim			19.483.900
1	05	02	2	02		Kegiatan Penegakkan Perda Kabupaten /Kota dan Peraturan Bupati/Walikota				0			90%	148.486.000
1	05	02	2	02	01	Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Keluaran : Jumlah kegiatan penyuluhan dan sosialisasi peraturan daerah dan peraturan bupati/walikota bagi masyarakat dan lingkungan pendidikan (SMA/SMK) Hasil : Terwujudnya masyarakat dan lingkungan pendidikan yang paham terhadap peraturan daerah dan peraturan bupati/walikota	Kab. Kotim		0	APBD Kab. Kotim			74.240.000

RENCANA KERJA TAHUN 2024

1	05	02	2	02	02	Sub Kegiatan Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Keluaran : Jumlah pengawasan, pendataan dan pelaporan terhadap perda dan perbup yang dilaksanakan Hasil : Terlaksananya kegiatan pengawasan, pendataan dan pelaporan terhadap perda dan perbup dengan lancar	Kab. Kotim		0	APBD Kab. Kotim			24.920.000
1	05	02	2	02	03	Sub Kegiatan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Keluaran : Jumlah aparaturnya yang berkerjasama melalui sidang Tipiring dan kegiatan lainnya yang terkait dalam menangani pelanggaran perda dan perbup Hasil : Terlaksananya penindakan terhadap pelanggaran perda dan perbup	Kab. Kotim		0	APBD Kab. Kotim			19.386.000
1	05	02	2	03		Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota				0			90%	155.450.000
1	05	02	2	03	01	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Keluaran : Jumlah PPNS yang mengikuti Sosialisasi,Pendidikan Formal dan Bimtek Teknis Hasil : Terwujudnya PPNS Satpol PP berkompeten dalam tugas dan fungsinya	sesuai undangan/Nota dinas/Telaahan staf		0	APBD Kab. Kotim			155.450.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahun 2024 sebagai acuan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berisi program, kegiatan dan sub kegiatan serta pagu indikatif. Pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Tahun 2024 harus dilakukan secara efektif dan efisien berdasarkan dari hasil mapping permendagri nomor 90 tahun 2019. Dalam Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 terdapat 2 Program, 6 kegiatan dan 16 sub kegiatan. Seluruh kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur yang tertuang dalam Renja didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kotawaringin Timur yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU). Rencana Kerja dan Pendanaan Program mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SOPD dan mengacu kepada RKPD dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021-2026. Dengan tanggung jawab sebagai salah satu pendukung kemajuan pembangunan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur memiliki rencana kerja tahun 2024 dengan total pagu sebesar Rp. 11.093.386.198

Minimnya pagu anggaran dari pemerintah daerah kepada Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur sehingga ada beberapa kegiatan yang belum dapat dilaksanakan. Berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Hasil Musrenbang RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024, Program Dan Kegiatan Yang Belum Diakomodir Dalam Rancangan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut :

1. Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - a. anggaran dana Honorarium Piket Patroli yang di gunakan untuk mengakomodir Kegiatan selama 1 tahun
 - b. Pelatihan Dasar Anggota Satpol PP (Diksar), Penambahan anggota PPNS, dan Belanja Sarana dan Prasarana untuk meningkatkan SPM (Standar Pelayanan Minimal)
2. Kegiatan Penegakkan Perda Kabupaten /Kota dan Peraturan Bupati/Walikota dan Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum

dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/kota yakni bidang Penegakkan Perundang-undangan untuk kegiatan Penertiban Gepeng, Sosialisasi Perda dan Perkada, Operasi gabungan bersama Bea Cukai terkait rokok illegal, dan Operasi Penyakit Masyarakat (PEKAT).

3. Kegiatan Penindakan atas gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk rasa dan Kerusahan Massa dan Kegiatan Penanganan Peraturan Daerah dan bidang Bidang Ketertiban dan Ketruman Masyarakat untuk melaksanakan kegiatan pelatihan Huru-Hara bagi Anggota Satpol PP dan Penertiban Pendapatan Usaha (Pajak), Izin Usaha, Reklame Bersama Dinas Terkait sebesar
4. Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satpol PP dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia
5. Penambahan peralatan dan perlengkapan kantor guna mewujudkan sarana dan prasarana perlengkapan dan peralatan kantor

Program Dan Kegiatan mendatang yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 adalah memasuki tahun Pilkada tahun 2024 mendatang. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu kepala daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tenteram, tertib, dan teratur sehingga penyelenggaraan Pilkada dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melaksanakan kegiatan dengan aman dan kondusif. Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja merupakan Perangkat Daerah yang perlu diberdayakan fungsinya dalam pelaksanaan pengamanan Pemilu disamping unsur kepolisian dan aparat keamanan lainnya. Untuk kelancaran kegiatan tersebut maka perlu adanya revisi anggaran Program Dan Kegiatan Dalam Rancangan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 terkait Pilpres dan Pilkada yaitu :

1. Honorarium Satlinmas kegiatan Pilkada berdasarkan surat Menteri Keuangan RI Nomor : S-647/MK.02/2022 Perihal Satuan Biaya Masukan lainnya (SBML) Tahapan Pemilu dan Tahapan Pemilihan
2. Pengadaan untuk baju/seragam anggota Satlinmas. Hal ini perlu mendapatkan pertimbangan karena seragam anggota satlinmas sudah tidak layak, berdasarkan pembagian terakhir 5 tahun yang lalu.
3. Pengawalan, Pengamanan dan Penertiban Pilkada yang dilaksanakan bersama dengan instansi terkait.

BAB V

PENUTUP

Dalam pelaksanaannya, penyusunan serta penetapan berbagai program dan kegiatan ditujukan untuk meningkatkan kualitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun anggaran 2024 yang diukur berdasarkan sasaran-sasaran yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021-2026. Program dan kegiatan dimaksudkan untuk mencapai sasaran-sasaran yang tertuang dalam Rencana Kerja Satpol PP Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 ini harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil pada pelaksanaan program/ kegiatan yang dilaksanakan di Satpol PP Kabupaten Kotawaringin Timur baik dalam kerangka regulasi maupun mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta pembagian urusan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk menjamin keberhasilan implementasi Rencana Strategis (Renstra) maka perlu dijabarkan dan diimplementasikan dalam Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2024 sebagai berikut :

1. Penetapan status hukum naskah perencanaan ini, sehingga implemantasinya bersifat mengikat dan konsekuensinya dapat dipertanggungjawabkan;
2. Sosialiasasi Renstra dan Renja ke semua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi seluruh pihak guna melaksanakan Renstra dan Renja yang telah di sepakati;
3. Pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen stakeholder terkait dan relevan secara disiplin tidak boleh menyimpang dari rencana kerja yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi.
4. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di rencana kerja ini secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat

keberhasilan pencapaian tujuan akhir pelaksanaan rencana kerja yang telah dibuat.

5. Pengevaluasian dan pengkajian hasil pengukuran pencapaian tujuan akhir sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian visi dan misi organisasi.

Dengan mengharap keridhoan Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, semoga rencana kerja yang telah dibuat ini dapat diwujudkan untuk mencapai tujuan akhir yaitu ***Terwujudnya Kabupaten Kotawaringin Timur Yang Mandiri, Maju, Sejahtera.***

Rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja merupakan Rencana Kerja satu tahunan yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran sebagai dokumen perencanaan program dan anggaran tahunan. Sasaran Strategis Renja Satuan Polisi Pamong Praja diarahkan dan dikendalikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja serta dilaksanakan oleh seluruh Bidang sesuai dengan lingkup tugas fungsi masing-masing.

Untuk mengantisipasi perubahan yang sangat cepat dan membutuhkan penanganan mendesak, diperhitungkan berbagai faktor-faktor yang mempengaruhi dalam aspek operasional termasuk hal yang bersifat *force majeure*.

a. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2024 dilaksanakan dengan memperhatikan kaidah-kaidah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik;
2. Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi di tingkat pelaksanaan dilakukan melekat oleh masing-masing bidang dan secretariat;
3. Pengendalian dan Evaluasi dilakukan dengan tertib dan obyektif serta disampaikan dalam bentuk laporan tertulis secara periodik kepada Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur yang terintegrasi dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Satuan Polisi Pamong Praja pada Bagian Organisasi.

b. Rencana Tindak Lanjut

Koordinasi dengan berbagai pihak dan instansi sejenis ditingkat Kabupaten/Kota serta kerjasama dengan pihak pusat dengan instansi

vertikal sangat mutlak agar di dapat pembangunan yang tepat sasaran bagi masyarakat.

Demikian Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 yang pada pokoknya merupakan kelanjutan dari kegiatan 2023 dan mengacu pada Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar Tahun 2021–2026 serta sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pokok Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Penegakan Peraturan Daerah (PERDA).